

Manajemen Layanan Bimbingan Konseling di SMP Madani Makassar

Nurhidayah¹, Riki Anggrian², Yuliani Pertiwi³, Hadryanti⁴

Bimbingan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Manado, Indonesia^{1,2,3}

Bimbingan dan Konseling, STKIP Andi Matappa, Indonesia⁴

nurhidayah@unima.ac.id¹, rikianggrian@unima.ac.id², yulianipertiwi@unima.ac.id³, hadryanti@matappa.ac.id⁴

Kata Kunci:

Manajemen Bimbingan
Dan Konseling, Layanan
BK, Implementasi Program
BK

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi manajemen bimbingan dan konseling (BK) di SMP Madani Makassar berdasarkan aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, ketenagaan, serta sarana dan prasarana pendukung layanan BK. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian terdiri atas guru BK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen BK di SMP Madani Makassar belum berjalan secara optimal. Pada aspek perencanaan, guru BK melakukan asesmen kebutuhan peserta didik melalui angket dan pemetaan masalah, namun belum ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen program. Pada tahap pelaksanaan, layanan BK masih didominasi oleh layanan responsif, sedangkan layanan dasar belum terlaksana secara maksimal karena tidak adanya jadwal rutin dan alokasi jam masuk kelas. Layanan perencanaan individual dan peminatan juga belum berjalan. Meskipun demikian, aspek evaluasi dan tindak lanjut telah dilakukan melalui evaluasi proses, evaluasi hasil, serta penyusunan laporan tindak lanjut layanan. Dari aspek ketenagaan, rasio guru BK dan jumlah peserta didik telah sesuai dengan ketentuan, namun kolaborasi antar personel sekolah dalam pelaksanaan layanan BK masih belum optimal. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, seperti belum tersedianya ruang konseling individu, ruang kelompok, serta instrumen pendukung layanan BK, turut menjadi kendala dalam pelaksanaan layanan secara maksimal. Secara keseluruhan, pelaksanaan bimbingan dan konseling di SMP Madani Makassar telah terlaksana dengan baik, namun masih perlu dilakukan perbaikan dalam hal penyusunan program tahunan sampai harian, pengoptimalan layanan perencanaan dan peminatan individu serta komponen layanan lainnya guna memaksimalkan peran bimbingan dan konseling sebagai bagian dari pendidikan dalam rangka mengoptimalkan perkembangan peserta didik.

Abstract

This study aims to describe the implementation of guidance and counseling (GC) management at SMP Madani Makassar based on aspects of planning, implementation, evaluation, staffing, as well as facilities and infrastructure supporting GC services. The study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation study. The research subjects consist of GC teachers. The results of the study show that the implementation of GC management at SMP Madani Makassar has not run optimally. In terms of planning, GC teachers conduct student needs assessments through questionnaires and problem mapping, but these have not been followed up with the preparation of program documents. At the implementation stage, GC services are still dominated by responsive services, while basic services have not been carried out optimally due to the absence of a regular schedule and allocation of time for classroom entry. Individual planning and interest services have also not been implemented. Nevertheless, the evaluation aspect.

Key Word:

Guidance And Counseling
Management, Guidance
And Counseling Services,
Implementation Of
Guidance And Counseling
Programs

Information Production:

© 2026 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA) 

PENDAHULUAN

Pendidikan yang bermutu, efektif dan ideal menurut Depdiknas tahun 2008 adalah pendidikan yang mengintegrasikan 3 aspek dalam penyelenggarannya, yakni bidang administrasi dan kepemimpinan, bidang instruksional atau kurikuler serta bidang bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dari sistem pendidikan, membantu siswa dan konselor berkembang menjadi individu yang mandiri dengan kemampuan untuk memahami diri mereka sendiri dan lingkungan mereka, menerima, mengarahkan, dan mengambil keputusan sendiri, dan menjalani kehidupan yang bahagia dan sejahtera.

Pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan di sekolah diharapkan dapat berjalan dengan optimal, dilakukan dengan cara-cara yang tepat serta memerlukan kegiatan manajerial yang baik. Hal

tersebut penting agar efektivitas layanan bimbingan dan konseling dapat mencapai keberhasilan. Sebelum melakukan layanan, konselor harus mengambil inisiatif dan melakukan manajemen dalam menjalankan tugasnya, hal ini juga menjadi salah satu kompetensi yang wajib dimiliki oleh konselor sekolah sesuai dengan Permendiknas No.27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor dengan muatan bahwa seorang konselor sekolah harus menguasai semua kompetensi, seperti mampu melakukan manajemen bimbingan dan konseling yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi di bidang bimbingan dan konseling.

Sebelum memberikan layanan sangat penting bagi guru bimbingan konseling melakukan perencanaan dan menganalisis setiap aspek yang dibutuhkan siswa serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pemberian layanan. (Prayitno & Amti, 2013). Adanya manajemen dalam bimbingan konseling akan membantu dan memudahkan konselor dalam memberikan layanan sebab setiap siswa berbeda dalam tugas perkembangannya sehingga diperlukan fleksibilitas dalam merancang dan melaksanakan program bimbingan dan konseling di sekolah.

Sebagai konselor di sekolah, mempelajari manajemen bimbingan konseling merupakan hal yang sangat perlu sebab manajemen organisasi bimbingan dan konseling dibutuhkan agar perkembangan yang optimal pada individu yang dibimbing dapat tercapai. Pada dasarnya kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah menjadi tanggungan bersama antara semua personil sekolah. Agar layanan bimbingan dan konseling berjalan dengan baik, harus ada pengelolaan organisasi yang baik dengan semua pihak harus bertanggung jawab, bersinergi dan bekerja berdasarkan program bimbingan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan baik sehingga layanan yang diberikan kepada peserta didik lebih efektif.

Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak sekolah yang belum memberikan layanan bimbingan dan konseling sesuai standar yang ditentukan, sehingga dalam prosesnya tidak berjalan dengan baik. Kasus yang terjadi seperti penyusunan program bimbingan dan konseling tidak dilakukan berdasarkan hasil analisis, studi kelayakan, serta tidak melibatkan *stakeholder* sekolah dalam merancang program bimbingan dan konseling. Aspek sarana dan prasana yang tidak memadai serta tidak sesuai standar juga menjadi masalah. Selain itu, citra guru BK sebagai polisi sekolah masih melekat bagi sebagian siswa di sekolah sehingga membuat siswa takut mengutarakan masalahnya dan enggan meminta bantuan kepada guru BK. Pemberian tugas lain diluar tupoksi guru BK juga menambah kompleksitas masalah pengelolaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah.

Kenyataan di lapangan pada uraian di atas juga ditemukan di SMP Madani Makassar, sebagai sekolah swasta yang baru berdiri pada tahun 2010, sekolah ini memiliki permasalahan seperti program bimbingan dan konseling disusun berdasarkan analisis kebutuhan siswa namun guru BK tidak membuat perencanaan program, sehingga komponen layanan yang paling banyak dilakukan adalah layanan responsif. Selain itu hanya guru BK yang bertanggung jawab membantu siswa dalam penyelesaian masalahnya sehingga antara wali kelas, guru mata pelajaran serta guru BK tidak bekerja sama dalam membina dan membantu siswa tumbuh secara optimal sesuai dengan tugas perkembangannya. Tidak ada jam masuk 2 JP per kelas per minggu, tidak ada jadwal masuk untuk semua kelas secara rutin serta dalam pelaksanaan layanan masih belum optimal. Masalah lain yang terjadi adalah sarana dan prasarana sekolah yang kurang memadai dalam menunjang pelaksanaan program bimbingan konseling di SMP Madani Makassar.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, tujuannya untuk mendeskripsikan implementasi manajemen bimbingan konseling di SMP Madani Makassar. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara terbuka, observasi serta studi dokumentasi terkait manajemen pelayanan bimbingan konseling di SMP Madani Makassar. Subjek penelitian ini adalah guru bimbingan dan konseling SMP Madani Makassar.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan mengorganisasikan data yang diperoleh ke dalam kategori-kategori yang relevan dengan fokus penelitian. Data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang paling relevan dan berkaitan dengan tujuan penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis. Selanjutnya, peneliti melakukan interpretasi terhadap data untuk menemukan pola, makna, serta hubungan antar variabel yang muncul selama proses penelitian. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, sehingga hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Program (1). Tahap Perencanaan (a). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru BK di SMP Madani Makassar Tahap perencanaan program BK di SMP Madani Makassar dimulai dari tahap analisis kebutuhan yang dilakukan sebelum membuat program BK. Berdasarkan penuturan guru BK bahwa analisis data dilakukan dengan menggunakan angket guna menganalisis permasalahan peserta didik. Lebih lanjut setelah analisis kebutuhan dilakukan guru BK kemudian memetakan masalah siswa berdasarkan bidang pribadi, sosial, belajar dan karier yang kemudian dipaparkan di rapat semester, lebih lanjut menurut NA selaku guru BK bahwa meskipun guru BK telah melakukan analisis kebutuhan dan pemetaan masalah sesuai bidang serta sosialisasi kepada warga sekolah namun guru belum membuat rencana program tahunan/semesteran serta belum memiliki dokumen perencanaan layanan seperti RPBK, materi dan instrumen. Kendala lainnya adalah belum tersedia papan informasi program.

Berdasarkan temuan observasi yang diperkuat dengan wawancara dengan guru BK bahwa guru BK di SMP Madani Makassar belum membuat dokumen perencanaan, ini memberikan gambaran bahwa perencanaan program BK di SMP Madani Makassar perlu ditindaklanjuti bukan hanya terhenti pada proses asesmen kebutuhan, pemetaan dan sosialisasi tapi perlu dilanjutkan dengan membuat program tahunan/semesteran/bulanan/mingguan bahkan harian karena perencanaan program yang baik membantu konselor mengidentifikasi kebutuhan siswa serta menentukan strategi layanan yang tepat.

Tahap Pelaksanaan (b). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan BK di SMP Madani Makassar belum berjalan optimal pada seluruh komponen layanan, seperti: Layanan Dasar (1). Berdasarkan observasi di lapangan yang diperkuat dengan hasil wawancara dengan NA sebagai guru BK bahwa pelaksanaan layanan dasar belum terlaksana secara rutin karena tidak adanya jadwal masuk kelas 2 JP per minggu. Guru BK hanya memanfaatkan waktu ketika terdapat kelas kosong atau guru mata pelajaran tidak hadir. Padahal layanan dasar merupakan layanan yang dapat dioptimalkan guru BK karena diberikan kepada seluruh peserta didik secara sistematis dan terencana. Layanan Responsif (2). Pelaksanaan layanan responsif di SMP Madani Makassar juga belum terlaksana secara optimal. Menurut wawancara dengan guru BK, siswa yang memiliki masalah dilayani segera, tetapi kadang-kadang guru BK gagal menyelesaikan masalah tersebut dan memberikannya kepada kepala sekolah, yang merupakan keputusan yang tidak bijak bagi guru BK. Biasanya alih tangan kasus dilakukan karena permasalahan siswa sudah berat dan diluar kapasitas dari guru bimbingan dan konseling. Namun, tidak semua kasus dialih tangankan kepada kepala sekolah, guru BK di SMP Madani Makassar juga banyak menggunakan strategi seperti konseling individu untuk kasus peserta diri seperti tidak percaya diri, malas ke sekolah, bullying, konflik dengan teman, dan kasus-kasus dibidang belajar dan karir. Dengan demikian pelaksanaan layanan responsif yang dilakukan guru BK sudah cukup baik dan terlaksana namun masih perlu banyak perbaikan ke depannya (3). Perencanaan Individual dan Peminatan

Hal berbeda terjadi pada pelaksanaan layanan perencanaan dan peminatan individu, menurut hasil wawancara dengan NA selaku guru BK bahwa pelaksanaan perencanaan individual dan peminatan di SMP Madani Makassar belum terlaksana sama sekali. Layanan perencanaan individual merupakan layanan yang membantu siswa dalam merencanakan masa depan mereka, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan pribadi. Layanan ini penting karena setiap siswa memiliki potensi dan minat yang berbeda, sehingga membutuhkan arahan yang tepat.

Dukungan Sistem (4). Selanjutnya pada pelaksanaan layanan dukungan sistem di SMP Madani Makassar cukup menunjang pelaksanaan program BK seperti ada mekanisme kerja yang jelas antar personil, ada kegiatan kerjasama dengan berbagai pihak seperti wali kelas, guru mata pelajaran dan orang tua, ada dukungan untuk program pengembangan keprofesian berkelanjutan (misal seminar, workshop dan sebagainya) seperti ikut dan aktif di forum Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) jenjang SMP sederajat Kota Makassar yang bertujuan meningkatkan profesionalitas guru BK.

Evaluasi dan Tindak Lanjut (c). Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Pada praktiknya, pelaksanaan evaluasi program BK di SMP Madani Makassar dilakukan dengan melibatkan stakeholder sekolah. Guru BK membuat laporan evaluasi proses, evaluasi hasil, serta laporan tindak lanjut program BK.

Aspek Ketenagaan (1). Personalia BK (a). Personalia BK di SMP Madani Makassar terdiri dari kepala sekolah, wali kelas, guru mata pelajaran, guru BK, dan staf administrasi. Sekolah hanya memiliki satu guru BK tanpa koordinator BK. Hasil observasi menunjukkan bahwa rasio guru BK dengan jumlah siswa telah sesuai dengan ketentuan Permendikbud No. 111 Tahun 2014, yaitu 1:150–160 siswa. Kerja Sama dengan Pihak Internal Sekolah (b). Hasil wawancara menunjukkan bahwa kerja sama antarpersonalia sekolah belum

berjalan optimal. Banyak wali kelas menyerahkan sepenuhnya penanganan masalah siswa kepada guru BK. Selain itu, hanya sebagian kecil guru mata pelajaran yang aktif terlibat dalam pelaksanaan program BK.

Di sisi lain, staf administrasi cukup membantu dalam pengadministrasian layanan BK, sedangkan kepala sekolah memberikan dukungan yang baik terhadap pelaksanaan program dan pengembangan profesional guru BK.

Aspek Sarana dan Prasarana Penunjang BK (2). observasi menunjukkan bahwa ruang BK berada pada lokasi strategis, mudah dijangkau siswa, dan jauh dari keributan. Terdapat ruang kerja bagi guru BK, namun belum tersedia ruang konseling individu, ruang tamu, ruang BK kelompok, ruang data, dan ruang pustaka.

Ukuran ruang BK juga belum memenuhi standar minimal 9 m² sebagaimana tercantum dalam Permendikbud No. 111 Tahun 2014. Dalam aspek sarana, beberapa instrumen administrasi telah tersedia seperti biodata konseli, pedoman wawancara, format surat, format pelayanan, dan format studi kasus. Namun, instrumen penting seperti AUM, ITP, catatan anekdot, RPLBK, program tahunan/semesteran, dan papan informasi program belum tersedia.

Manajemen adalah seni dan ilmu untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga melalui perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan atau pelaksanaan (*directing*), pengkoordinasian (*coordinating*), dan pengawasan (*controlling*). (Ratnawulan, 2016). Sedangkan dalam bimbingan dan konseling manajemen mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi (Ratnawulan, 2016). Manajemen BK disusun, dilaksanakan dan dievaluasi secara sistematis, terarah, dan berkesinambungan untuk memberikan layanan bantuan. Selain itu, pengorganisasian dilakukan untuk menciptakan struktur kerja yang sistematis, mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap personel BK serta memastikan sarana, prasarana, dan tenaga pendidik (guru BK/konselor) menjalankan tugas secara optimal untuk mencapai tujuan program. Sedangkan pengawasan juga menjadi hal penting untuk evaluasi pelaksanaan, pertanggung jawaban kinerja, dan menjamin bahwa layanan yang diberikan kepada siswa tetap berkualitas, relevan, dan sesuai standar.

Mengingat bahwa bimbingan adalah bagian penting dari program pendidikan sekolah, manajemen diperlukan untuk kegiatan bimbingan dan konseling. Manajemen bimbingan dan konseling merupakan bagian dari dukungan sistem dalam mendukung pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling guna mengoptimalkan dan mengembangkan potensi siswa serta mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi di bidang pribadi, sosial, belajar, maupun karier.

Berdasarkan tujuan penelitian adalah mendeskripsikan implementasi manajemen bimbingan konseling di SMP Madani Makassar sehingga dilakukan observasi serta wawancara dengan guru BK dengan latar belakang pendidikan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Tahap observasi dilakukan dengan mencermati dan meninjau pelaksanaan layanan BK di sekolah baik di kelas VII, VIII, dan IX. Pelaksanaan BK di SMP Madani Makassar diamati lalu dikaitkan dengan aspek manajemen yang terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), pengawasan (*monitoring*) dan evaluasi (*evaluation*) yang dirinci dan diperluas menjadi beberapa bagian berdasarkan Permendikbud No. 111 Tahun 2014 yaitu aspek program yang terdiri dari fase perencanaan, fase pelaksanaan, fase evaluasi dan tindak lanjut. Selanjutnya aspek ketenagaan (pengorganisasian) yang terdiri dari personalia BK dan kerjasama dengan pihak internal sekolah. Aspek sarana dan prasarana yang terdiri dari sarana dan prasarana umum di sekolah, sarana dan prasarana ruang BK serta sarana penunjang BK.

Aspek Program (1). Tahap Perencanaan (a). Aspek program menjadi hal penting dalam bimbingan dan konseling di sekolah. Perencanaan program adalah bimbingan dan konseling menjadi langkah awal yang sangat menentukan keberhasilan layanan. Menurut para ahli seperti Gibson & Mitchell (2005), perencanaan merupakan proses sistematis yang didasarkan pada kebutuhan peserta didik sehingga program yang disusun dapat tepat sasaran. Tanpa perencanaan yang baik, layanan bimbingan dan konseling cenderung tidak terarah dan kurang efektif dalam membantu peserta didik.

Secara umum, program bimbingan dan konseling dirancang berdasarkan kebutuhan peserta didik dan kondisi lingkungan sekolah, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Program ini mencakup berbagai jenis layanan seperti layanan orientasi, informasi, konseling individu, konseling kelompok, bimbingan kelompok, serta layanan penempatan dan penyaluran. Menurut Gibson & Mitchell (2005), perencanaan program bimbingan dan konseling adalah suatu proses sistematis dalam merancang kegiatan layanan berdasarkan kebutuhan siswa agar perkembangan mereka dapat tercapai secara optimal. Perencanaan ini melibatkan identifikasi kebutuhan, penentuan tujuan, serta penyusunan strategi layanan. Perencanaan program bimbingan dan konseling merupakan tahap awal yang sangat penting dalam penyelenggaraan layanan BK di sekolah, agar layanan terarah dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, perencanaan program BK di SMP Madani Makassar diawali dengan analisis kebutuhan melalui angket untuk mengidentifikasi permasalahan peserta didik.. Dalam perencanaan, guru BK atau konselor sekolah mengevaluasi kebutuhan peserta didik, menganalisis masalah, dan menentukan jenis layanan, waktu, dan lokasi yang akan diberikan lalu dibuat ke dalam program BK, baik tahunan maupun semesteran. (Sinaga, M. H. P. dkk., 2022). Hasil analisis kemudian dipetakan ke dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karier serta disosialisasikan dalam rapat semester. Namun, guru BK belum menyusun dokumen perencanaan program secara lengkap, seperti program tahunan dan semesteran, RPBK, materi layanan, maupun instrumen pendukung. Selain itu, sarana informasi program BK juga belum tersedia

Menurut Prayitno, perencanaan program BK merupakan kegiatan menyusun seluruh layanan bimbingan dan konseling secara terarah, dari program tahunan, program semester, hingga program harian, yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Sementara itu, Tohirin menyatakan perencanaan program BK harus didasarkan pada hasil analisis kebutuhan (*need assessment*), sehingga program yang disusun benar-benar relevan dan tepat sasaran. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perencanaan program BK masih terbatas pada tahap asesmen kebutuhan dan pemetaan masalah, sehingga diperlukan pengembangan perencanaan yang lebih sistematis dan berkelanjutan agar layanan BK dapat terlaksana secara efektif sesuai kebutuhan peserta didik.

Tahap pelaksanaan (b). Tahap pelaksanaan program bimbingan dan konseling merupakan suatu proses sistematis, terencana, dan berkesinambungan dalam mengimplementasikan seluruh rancangan layanan bimbingan dan konseling yang telah disusun sebelumnya untuk membantu peserta didik mencapai perkembangan yang optimal. Proses ini mencakup berbagai kegiatan. Dalam proses ini, guru bimbingan dan konseling atau konselor memberikan berbagai layanan kepada siswa, baik secara individu maupun kelompok, dengan tujuan membantu peserta didik meningkatkan kapasitas diri, lebih memahami diri dan lingkungan, serta mengatasi masalah yang mereka hadapi setiap hari.

Pada tahap ini, layanan bimbingan dan konseling dilaksanakan sebagai bagian dari perencanaan program yang telah disusun sebelumnya. Bimbingan dan konseling diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Tujuan program bimbingan dan konseling adalah untuk membantu peserta didik berkembang secara optimal dalam hal belajar, karier, pribadi, dan sosial.

Pelaksanaan program bimbingan dan konseling tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah siswa, tetapi juga mencakup upaya pencegahan (*preventif*), pengembangan (*developmental*), dan perbaikan (*kuratif*). Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan berbagai jenis layanan seperti layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual dan peminatan, layanan orientasi, informasi, konseling individual, bimbingan kelompok, dukungan sistem serta kegiatan pendukung lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, dan tahap perkembangan peserta didik. Prayitno (2004) menyatakan bahwa layanan BK harus mampu mengakomodasi berbagai permasalahan dan kebutuhan siswa melalui pendekatan yang bersifat menyeluruh, berkesinambungan, dan berorientasi pada perkembangan individu. Selain itu, pelaksanaan program bimbingan dan konseling juga merupakan bentuk nyata dari fungsi pendidikan yang tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga aspek pribadi, sosial, dan karier. Oleh karena itu, kegiatan ini harus dilakukan secara profesional, berdasarkan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, dan kemandirian.

Pelaksanaan program BK melibatkan komponen atau jenis layanan. Komponen atau jenis layanan seperti layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan peminatan serta dukungan sistem adalah bagian dari implementasi program BK. Layanan dasar, menurut Departemen Pendidikan Nasional (2008), adalah proses memberikan bantuan kepada setiap siswa melalui kegiatan terorganisir yang bertujuan untuk membangun keterampilan hidup dan perilaku yang efektif. Berdasarkan observasi di lapangan yang diperkuat dengan hasil wawancara dengan NA sebagai guru BK, bahwa pelaksanaan layanan dasar yang seharusnya ada jam masuk 2 JP per kelas per minggu, terjadwal secara rutin untuk semua kelas dan ada kurikulum (materi khusus) untuk 4 bidang BK namun pelaksanaannya di lapangan tidak ada jam masuk 2 JP per kelas per minggu hal ini dikarenakan tidak ada jam khusus yang diberikan, juga tidak ada layanan dasar yang terjadwal secara rutin untuk semua kelas sehingga guru BK hanya memanfaatkan waktu jika ada kelas kosong atau ada guru mata pelajaran yang tidak masuk. Padahal layanan dasar merupakan layanan yang dapat dioptimalkan guru BK karena diberikan kepada seluruh peserta didik secara sistematis dan terencana. Layanan ini biasanya dilaksanakan dalam bentuk kegiatan klasikal atau kelompok, sehingga dapat menjangkau seluruh siswa tanpa terkecuali.

Layanan dasar merupakan inti dari program BK karena berfungsi sebagai fondasi dalam pengembangan diri siswa (Gysbers dan Henderson, 2006) karena bersifat pencegahan dan fokus pada

pengembangan potensi siswa. Hal ini membuat porsi waktu untuk layanan dasar sebesar 25%-35% (Ditjen GTIK Kemdikbud, 2016), dengan harapan besarnya jangkauan dan tujuannya yang menasar pencegahan dan pengembangan potensi peserta didik dapat mencegah munculnya masalah pada siswa melalui pemberian pemahaman sejak dini.

Pelaksanaan layanan responsif di SMP Madani Makassar juga belum terlaksana secara optimal. Menurut wawancara dengan guru BK, siswa yang memiliki masalah dilayani segera, tetapi kadang-kadang guru BK gagal menyelesaikan masalah tersebut dan memberikannya kepada kepala sekolah, yang merupakan keputusan yang tidak bijak bagi guru BK. Biasanya alih tangan kasus dilakukan karena permasalahan siswa sudah berat dan diluar kapasitas dari guru bimbingan dan konseling. Kasus berat ini biasanya dialih tangankan kepada psikolog, psikiater, dokter, polisi, serta ahli hukum (Fitria. D. E. dkk, 2024) dan kepala sekolah bukanlah pihak yang sering dikaitkan dengan alih tangan kasus. Layanan responsif seyogyanya menerapkan strategi konseling individual, konseling kelompok, konsultasi, kolaborasi, kunjungan rumah, atau alih tangan kasus. Namun, tidak semua kasus dialih tangankan kepada kepala sekolah, guru BK di SMP Madani Makassar juga banyak menggunakan strategi seperti konseling individu untuk kasus peserta diri seperti tidak percaya diri, malas ke sekolah, bullying, konflik dengan teman, dan kasus-kasus dibidang belajar dan karir. Dengan demikian pelaksanaan layanan responsif yang dilakukan guru BK sudah cukup baik dan terlaksana namun masih perlu banyak perbaikan ke depannya.

Selanjutnya, pelaksanaan perencanaan individual dan peminatan di SMP Madani Makassar belum terlaksana sama sekali. Layanan perencanaan individual merupakan layanan yang membantu siswa dalam merencanakan masa depan mereka, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan pribadi. Layanan ini penting karena setiap siswa memiliki potensi dan minat yang berbeda, sehingga membutuhkan arahan yang tepat. Gysbers & Henderson (2006) menyatakan bahwa layanan perencanaan individual membantu siswa dalam menetapkan tujuan serta menyusun langkah-langkah untuk mencapainya. Dalam pelaksanaannya, layanan ini melibatkan kegiatan seperti pengenalan diri, penilaian potensi, serta perencanaan karier. Konselor berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa memahami pilihan yang tersedia serta konsekuensi dari setiap pilihan tersebut.

Komponen layanan dukungan sistem merupakan layanan yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan program BK secara keseluruhan. Layanan ini tidak langsung diberikan kepada siswa, tetapi lebih berfokus pada pengelolaan program dan kerja sama dengan berbagai pihak. Gysbers & Henderson (2006) menyatakan bahwa dukungan sistem meliputi manajemen program, pengembangan profesional konselor, serta kolaborasi dengan guru dan orang tua. Dalam praktiknya, dukungan sistem mencakup kegiatan seperti koordinasi dengan guru mata pelajaran, kerja sama dengan orang tua, evaluasi layanan, pelatihan konselor, serta pengembangan kebijakan sekolah yang mendukung layanan BK. Pelaksanaan dukungan sistem di SMP Madani Makassar cukup menunjang pelaksanaan program BK seperti ada mekanisme kerja yang jelas antar personil, ada kegiatan kerjasama dengan berbagai pihak seperti wali kelas, guru mata pelajaran dan orang tua, ada dukungan untuk program pengembangan keprofesian berkelanjutan (misal seminar, workshop dan sebagainya) seperti ikut dan aktif di forum Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) jenjang SMP sederajat Kota Makassar yang bertujuan meningkatkan profesionalitas guru BK.

Evaluasi dan Tindak Lanjut (c). Evaluasi program dalam bimbingan dan konseling (BK) merupakan suatu proses yang sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan layanan konseling di sekolah. Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga mencakup keseluruhan proses pelaksanaan program, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan layanan. Melalui evaluasi, konselor dapat mengetahui sejauh mana tujuan program telah tercapai serta menilai efektivitas dan efisiensi layanan yang diberikan kepada peserta didik. Secara lebih luas, evaluasi program BK juga dipahami sebagai upaya untuk menyediakan informasi yang akurat bagi pengambilan keputusan terkait keberlanjutan, perbaikan, atau pengembangan program (Gumilang, 2019).

Evaluasi program BK merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui sejauh mana program BK yang telah dilaksanakan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konselor dapat menggunakan evaluasi sebagai alat penting untuk menilai apakah program yang telah diterapkan benar-benar memberikan dampak positif terhadap perkembangan siswa, baik dalam hal aspek pendidikan, sosial, dan emosional. Evaluasi juga membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program untuk perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan evaluasi di SMP Madani Makassar dilakukan secara khusus melibatkan stakeholder, guru BK juga membuat laporan tertulis kegiatan evaluasi baik evaluasi proses maupun evaluasi hasil serta dibuatkan juga laporan tindak lanjut.

Aspek Ketenagaan (1). Personalia BK (a). Personalia di sekolah memainkan peran penting dalam menjalankan bimbingan dan konseling. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator bimbingan dan konseling (BK), guru BK, guru, wali kelas, dan staf administrasi adalah semua anggota personalia, yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab tertentu. Kerjasama personel BK sangat penting untuk menyelesaikan masalah dan menumbuhkan potensi peserta didik (Ardiansyah, F dkk, 2023). Peran personalia BK sebagai fasilitator dan kolaborator artinya setiap personil di sekolah memiliki tanggung jawab memahami, mengamati, menjembatani dan saling berkolaborasi untuk membimbing dan mengembangkan potensi yang dimiliki siswa.

Gambaran personalia BK di SMP Madani Makassar, terdiri dari Kepala sekolah, wali kelas, guru, guru BK, dan staf administrasi. Dalam hal layanan bimbingan dan konseling, SMP Madani hanya memiliki satu guru BK tanpa ada koordinator Bimbingan dan Konseling. Menurut Permendikbud No. 111 Tahun 2014, bahwa rasio guru BK/Konselor dengan siswa asuh adalah 1:150 s.d 160. Proporsi guru BK dan konseli harus memenuhi kriteria tersebut agar program layanan bimbingan dan konseling efektif dan efisien. Berdasarkan observasi dan data yang diperoleh di lapangan bahwa rasio antara guru BK dan siswa di SMP Madani sudah sesuai dengan rasio yang direkomendasikan, hal ini karena sekolah tersebut merupakan sekolah yang belum lama berdiri membuat siswa yang terdaftar belum terlalu banyak sehingga meskipun hanya 1 guru BK, perbandingannya dengan jumlah siswa seimbang dan sesuai dengan yang direkomendasikan. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, setiap personil di sekolah memiliki tanggung jawab dan perannya masing-masing.

Kerjasama dengan Pihak Internal Sekolah (b). Setiap personalia di sekolah memiliki tanggung jawab dan perannya masing-masing, namun, kerjasama antar personil sekolah perlu dilakukan, kerjasama bertujuan untuk membantu siswa dalam mencapai tugas perkembangannya. Bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan yang tidak hanya dilakukan oleh konselor saja, tetapi juga melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki peran dalam kehidupan peserta didik (Prayitno, 2004), kerjasama antar personil sekolah dalam layanan konseling akan mengarah kepada individu yang memahami potensi di dalam dirinya (Sari, A. K dkk, 2021). Dengan demikian, keberhasilan program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dipengaruhi oleh kerja sama yang baik antara konselor dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pendidikan.

Di SMP Madani Makassar, kerja sama antar personalia belum berjalan dengan baik. Hasil wawancara dengan NA menunjukkan bahwa banyak wali kelas yang tidak terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program BK dan cenderung menyerahkan semua masalah dan menganggap guru BK sebagai "bengkel" untuk membantu siswa yang bermasalah. Padahal wali kelas seharusnya menjadi orang tua kedua bagi siswa di sekolah dan menjadi pribadi yang paling memahami siswa. Selain itu, guru mata pelajaran hanya sebagian kecil yang memahami dan terlibat dalam pelaksanaan program BK, padahal guru mata pelajaran wajib berperan aktif dan bekerjasama dengan guru BK dalam pelaksanaan bimbingan konseling (Sutirna, 2019). Sedangkan staf administrasi di SMP Madani Makassar memahami dan terlibat dalam membantu pengadministrasian kegiatan BK di sekolah. Dalam hal kerjasama keunggulan SMP Madani Makassar, ada pada keterlibatan aktif dan dukungan penuh dari kepala sekolah, dukungan ini terlihat dengan memahami tugas pokok dan fungsi konselor, berkolaborasi dengan guru BK atau konselor dalam melaksanakan program BK di sekolah serta memberikan dukungan kepada guru BK untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalisme melalui dukungan untuk ikut aktif dalam seminar, musyawarah guru BK serta kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan BK di sekolah.

Aspek Saran dan Prasarana Penunjang BK (3). Sarana dan prasarana adalah perlengkapan yang digunakan untuk menunjang ketercapaian layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Sarana mencakup segala alat yang digunakan secara langsung untuk mencapai tujuan, biasanya ukurannya relatif kecil dan mudah dipindahkan sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar yang menunjang pemanfaatan sarana, ukurannya relatif besar dan tidak mudah dipindahkan. Sarana dan prasarana bimbingan dan konseling adalah alat yang dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan BK (Sugiarto dkk., 2021). Dalam bimbingan dan konseling, alat-alat atau media yang digunakan untuk keperluan layanan termasuk instrumen pengumpulan data seperti buku catatan, komputer, dan alat inventori atau tes untuk penelusuran bakat dan minat; instrumen sosiometri; laporan hasil konseling; laporan studi kasus; skala sikap; dan instrumen sosiometri lainnya. Perlengkapan teknis ialah alat-alat atau media yang digunakan untuk keperluan layanan bimbingan seperti buku paket bimbingan (pribadi, sosial, belajar, karir), media digital, video, slide dsb. (Thantawy, 1995). Sedangkan prasarana untuk bimbingan dan konseling, fasilitas bangunan diperlukan. Ini termasuk ruang kerja guru pembimbing, ruang konseling individu, ruang kegiatan kelompok, ruang data siswa, ruang instrumen konseling, ruang tamu, ruang perpustakaan konseling, ruang komputer, ruang media

konseling, ruang ibadah, dan fasilitas umum seperti air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, transportasi, dan sebagainya (Sukardi, 2000). Pelaksanaan layanan bimbingan konseling dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai juga membantu mencapai tujuan bimbingan dan konseling di sekolah.

Berdasarkan observasi dan wawancara kepada guru BK SMP Madani Makassar, diperoleh data bahwa prasarana seperti posisi ruang BK yang strategis dan mudah dijangkau oleh siswa serta jauh dari keributan karena berada dilantai 3. Terdapat ruang kerja bagi guru BK, namun ruang konseling individu, ruang tamu, ruang BK kelompok, ruang data dan ruang pustaka tidak ada. Berdasarkan Permendikbud No. 111 Tahun 2014, luas minimal ruangan konseling adalah 9 m² juga tidak terpebuhi karena ruang BK yang diberikan berukuran kecil sehingga dalam prasarana masih jauh dari kata memadai. Sedangkan dalam hal sarana seperti instrumen dan pengumpulan data sebagian ada seperti Biodata konseli, pedoman wawancara, format surat (panggilan, home visit, surat izin siswa keluar, surat peringatan, surat perjanjian) format pelayanan dan format study kasus. Namun, instrumen penting seperti AUM, ITP, catatan anekdot, serta RPLBK belum tersedia, dokumen program BK seperti program tahunan/semesteran, juga belum tersedia papan informasi program. Dari data yang diperoleh, dalam hal sarana dan prasarana di SMP Madani Makassar masih jauh dari memadai sehingga hal ini memengaruhi proses pemberian layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi manajemen bimbingan dan konseling di SMP Madani Makassar, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan manajemen bimbingan dan konseling belum berjalan secara optimal pada seluruh aspek manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengorganisasian, serta sarana dan prasarana pendukung layanan BK. Pada aspek program, guru BK telah melakukan analisis kebutuhan peserta didik melalui penyebaran angket dan pemetaan masalah berdasarkan bidang pribadi, sosial, belajar, dan karier. Namun, hasil asesmen tersebut belum ditindaklanjuti dalam bentuk dokumen program yang sistematis seperti program tahunan, semesteran, RPBK, materi layanan, instrumen BK, dan papan informasi program. Hal ini menunjukkan bahwa tahap perencanaan belum terlaksana secara menyeluruh sesuai standar pelaksanaan BK di sekolah. Pada tahap pelaksanaan, layanan BK di SMP Madani Makassar lebih dominan pada layanan responsif, sedangkan layanan dasar belum terlaksana secara optimal karena tidak adanya jadwal rutin dan alokasi jam masuk kelas 2 JP per minggu. Layanan perencanaan individual dan peminatan juga belum terlaksana. Sementara itu, layanan dukungan sistem telah berjalan cukup baik melalui kerja sama dengan kepala sekolah, guru, orang tua, serta keterlibatan guru BK dalam kegiatan pengembangan profesional seperti MGBK. Pada aspek evaluasi dan tindak lanjut, guru BK telah melaksanakan evaluasi proses dan hasil layanan serta menyusun laporan tindak lanjut sehingga aspek ini tergolong sudah berjalan dengan cukup baik. Dari aspek ketenagaan, rasio guru BK dan jumlah siswa telah sesuai dengan ketentuan Permendikbud No.111 Tahun 2014, namun kerja sama antar personel sekolah masih belum optimal karena sebagian wali kelas dan guru mata pelajaran belum terlibat aktif dalam pelaksanaan layanan BK. Selain itu, aspek sarana dan prasarana BK di SMP Madani Makassar masih belum memadai. Keterbatasan ruang BK, belum tersedianya ruang konseling individu, ruang kelompok, ruang data, serta minimnya instrumen dan media layanan BK menjadi hambatan dalam pelaksanaan layanan secara optimal. Dengan demikian, implementasi manajemen bimbingan dan konseling di SMP Madani Makassar masih memerlukan banyak pengembangan dan perbaikan agar layanan BK dapat terlaksana secara efektif, sistematis, dan sesuai standar nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Ardiansyah, F., Mulyani, R., Khesya, N., & Prasetya, M. A. (2023). Peran personalia sekolah dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling di MTs Muhammadiyah 01 Medan. *Effect: Jurnal Kajian Konseling*, 2(1), 20–24. <https://doi.org/10.58432/effect.v2i1.977>
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Penataan pendidikan profesional konselor dan layanan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal*. Depdiknas.
- Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. (2016). *Panduan operasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling sekolah menengah atas (SMA)*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Fitria, E. D., Maulidah, I., Julian, P. D., & Lestari, T. D. (2024). Implementasi layanan program bimbingan konseling dengan model alih tangan kasus di SMKN 1 Cijulang. *J-STAF: Siddiq, Tabligh, Amanah, Fathonah*, 3(1), 92–100. <https://doi.org/10.62515/staf.v3i1.320>

- Gibson, R. L., & Mitchell, M. H. (2005). *Introduction to counseling and guidance* (6th ed.). Pearson Education.
- Gumilang, S. (2019). *Pembangunan dan evaluasi program layanan bimbingan dan konseling (Teori dan praktik)*. Azizah Publishing, 11(1).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah*. Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor*. Kemendiknas.
- Norman C. Gysbers, & Patricia Henderson. (2012). *Developing and managing your school guidance and counseling program* (5th ed.). American Counseling Association.
- Prayitno. (2004). *Dasar-dasar bimbingan dan konseling*. Rineka Cipta.
- Ratnawulan, T. (2016). *Manajemen bimbingan konseling di SMP kota dan kabupaten Bandung*. Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.22373/je.v2i1.694>
- Sari, A. K., Neviyarni, S., & Syukur, Y. (2021). *Urgensi kerjasama personil bimbingan konseling di sekolah*. TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan dan Konseling, 5(1), 30–39. <https://doi.org/10.26539/teraputik.51603>
- Sinaga, M. H. P., Qurrata, K., & Andini, V. (2022). *Pola pelaksanaan manajemen bimbingan dan konseling di sekolah menengah atas*. Bulletin of Counseling and Psychotherapy, 4(1), 110–116. <https://doi.org/10.51214/bocp.v4i2.166>
- Sugiarto, S., Neviyarni, S., & Firman, F. (2021). *Peran penting sarana dan prasarana dalam pembelajaran bimbingan konseling di sekolah*. JPT: Jurnal Pendidikan Tematik, 2(1), 60–66. <https://doi.org/10.62159/jpt.v2i1.223>
- Sukardi, D. K. (2000). *Pengantar pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah*. Rineka Cipta.
- Sutirna. (2019). *Layanan bimbingan dan konseling bagi guru mata pelajaran*. Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman, 5(1), 1–8. <https://doi.org/10.31602/jbkr.v5i1.1762>
- Thantawy, R. (1995). *Manajemen bimbingan dan konseling*. Pamator Press.